Lentora Justice

JURNAL ILMIAH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

1. Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Geng Motor di Kota Palu
(Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, S.H., M.H.)
2. Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
(Achmad Allang, S.H., M.H.)
3. Sibernetika, Teknologi Siber dan Kebutuhan Hukum.
(Aan Aswari, S.H., M.H.)
4. Islam Menganjurkan Pernikahan untuk Menghindari Terjadinya Perzinahan dan Kehamilan di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam.
(Drs. H. Arsyad Said, S.H., M.H.)
5. Aspek Hukum Tindak Pidana Perjudian Online.
(Kaharuddin Syah, S.H., M.H.)
6. Konsep Ganti Rugi terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Reklamasi Pantai.
(Hj. Haerani Husainy, S.H., M.H.)

SIBERNETIKA, TEKNOLOGI SIBER DAN KEBUTUHAN HUKUM

Aan Aswari, S.H.,M.H.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Maraknya penggunaan media online dalam hal melakukan perbuatan hukum di era semakin moderen ini, maka diperlukan sebuah masukan untuk regulasi tentang khususnya transaksi eletronik (e-commerce) dalam rangka meningkatkan keamanan dan manfaat dari transaksi melalui media online, serta menaruh kepercayaan bagi masyarakat untuk menggunakan media online sebagai peluang untuk mengembangkan usaha mulai dari mikro hingga makro, sebagai media promosi secara instan, murah, cakupan dan skala secara global serta menaruh kepercayaan pada sebuah media online. Melalui upaya riset atau penelitian akan mencari dan membawa pemahaman lebih kepada manusia untuk mulai tidak bersikap menolak terhadap metode-metode yang lebih baik daripada sebelumnya, dalam menggapai sebuah tujuan (cita-cita). Metode terbaru diharapkan membawa efisiensi waktu dalam pengolahan untuk mencapai sebuah tujuan lebih banyak dalam satu rentan waktu yang singkat di dalam kehidupan manusia. Olehnya dibutuhkan pola yang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi untuk mewujudkan suatu tindakan dalam mencapai tujuan akhir.

Kata Kunci : Sibernetika, Teknologi Siber dan Kebutuhan Hukum

A. PENDAHULUAN

Banyaknya modus dalam perbuatan melawan hukum dan masalah wanprestasi dalam transaksi dengan menggunakan media *online*, mestinya dapat segera diantisipasi oleh pemerintah. Maka diharapkan munculnya sesuatu yang dapat membawa harapan positif bagi masyarakat Indonesia untuk mulai mengenal jendela dunia ini, bukan bertahan pada perspektif masyarakat bahwa internet itu lebih banyak sisi negatifnya, sehingga pemanfaatan teknologi ini masih dianggap suatu budaya barat yang membawa suatu dampak yang buruk

bagi generasi akan datang sehingga banyak masyarakat masih enggan mendekati dunia teknologi ini.

Maka untuk mewujudkannya, diperlukan langkah dasar yaitu salah satunya mengaplikasikan teori-teori yang terkait dengan sesuatu hal yang akan dikaji lebih mendalam. Teori berguna sebagai patokan dasar atau garis-garis dasar sains dan ilmu pengetahuan yang mendukung suatu tujuan ditentukan oleh banyak faktor yang terkait, diantaranya teori sibernetika yang dicetuskan oleh Parson yang melihat beberapa faktor terkait, yang mana faktor-faktor terkait tersebut berusaha dapat mewujudkan tindakan manusia itu mengarah kepada tujuan tertentu yang diharapkan dalam sebuah sistem, yaitu baik yang diharapkan oleh individu maupun masyarakat. Dengan melihat hal ini terkait manusia sebagai subyek, maka tentunya hal ini juga akan terkait pada hukum (*ubi societas ibi ius*).⁵³

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Defenisi Sibernetika

Pengertian sibernetika telah dikemukakan oleh Louis Couffignal pada tahun 1956, beliau adalah salah satu pelopor sibernetika, yang mengkarakterisasi sibernetika sebagai “seni untuk memastikan keberhasilan dalam suatu tindakan”.⁵⁴ *"Cybernetics is a theory of control systems based*

⁵³ Adagium Cicero, di mana ada masyarakat disitu ada hukum yang berlaku. Namun rupanya adagium ini pada masa sekarang telah mengalami perkembangan. Di tengah hutan belantara yang tidak dihuni manusia, ternyata hukum pun ada dengan setia mengatur fenomena alam. Dikutip dari Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi & Sosiologi Hukum, (Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan)*, PT.Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2009. H, 159. Yang mengutip dari Kaimuddin Salle, *Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang, Sebuah Kajian Lingkungan Adat pada Masyarakat Ammatoa, Kajang, Bulukumba*, Disertasi, PPS UNHAS, Makassar, 1999. H, 177.

⁵⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Sibernetika> diakses 21 Maret 2015

*on communication (transfer of information) between systems and environment and within the system, and control (feedback) of the system's function in regard to environment".*⁵⁵ Sibernetika adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi (penyampaian informasi) antara sistem dan lingkungan, dan antar sistem, pengontrol (*feedback*) dari sistem berfungsi dengan memperhatikan lingkungan. Jadi, antara unsur satu dengan unsur lainnya harus saling mempengaruhi agar tidak terjadi konflik.

Kedua penjelasan semula akan dikaitkan dengan teori sibernetika yang dikemukakan oleh Talcott Parson (1902-1979), bahwa kehidupan masyarakat itu merupakan suatu sistem yang saling terkait, dan terdiri dari empat subsistem, yaitu,⁵⁶

- "a. Sub-Sistem Ekonomi; berfungsi sebagai penyesuaian atau adaptasi (adaptation), secara sistematis terhadap semua proses kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, dan budaya);*
- b. Sub-sistem politik; berfungsi untuk mencapai tujuan (goal) yaitu mendorong warga masyarakat untuk menghormati kaidah dan nilai-nilai hukum;*
- c. Sub-sistem sosial; berfungsi sebagai integrasi yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara proses hukum dengan sistem sosial dalam masyarakat;*

⁵⁵Ludwig Bartalanffy (<http://bk-smansapurwodadi.blogspot.com/2013/02/teori-belajar-sibenertik.html>) diakses 23 maret 2015

⁵⁶<http://hermannippi.blogspot.com/2014/08/talcott-parsons-dengan-teori-sibernetik.html> (diakses 21 Maret 2015).

d. Sub-sistem budaya; berfungsi untuk mempertahankan pola perilaku dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang positif."

Keempat subsistem (pranata) ekonomi, politik, hukum dan budaya⁵⁷ tersebut akan bekerja secara mandiri tetapi saling bergantung satu sama lain utk mewujudkan keutuhan & kelestarian sistem sosial secara keseluruhan. Prinsip dasar pemikiran Parson yaitu melihat tindakan individu / manusia itu diarahkan pada suatu tujuan. Bagian terkecil dalam masyarakat yang merupakan tiap-tiap individu pada hakikatnya menggunakan keempat subsistem tersebut sebagai bentuk sebuah alat dan sebuah tujuan. Tindakan setiap individu dilakukan pada suatu keadaan yang telah memenuhi salah satu dari keempat sub sistem di atas, dan kemudian subsistem lainnya mendukung pencapaian suatu tujuan setiap manusia, mereka bebas menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai tujuannya, meski dengan berbagai cara, karena dibelakang sebuah tujuan, terdapat niat besar atau motivasi yang mempengaruhi kondisi setiap individu untuk mewujudkan harapannya.

2. Keterkaitan Teori Sibernetika terhadap Masyarakat

Sibernetika berhubungan erat dengan beberapa teori, yaitu teori informasi, teori pengendalian sosial dan teori sistem.⁵⁸ Teori-teori ini

⁵⁷ (*adaptation, goal, attainment, integration, latency*) disingkat AGIL. Minimal keempat unsur sistem ini apabila berjalan dengan baik, maka selalu punya solusi untuk menyelesaikan konflik.

⁵⁸ Teori Informasi : simbol-simbol yang dipertukarkan, mengirim simbol-simbol itu dari satu titik di suatu tempat ke titik lain di tempat lainnya..

Teori Pengendalian Sosial : Metode yang digunakan untuk menertibkan masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Tujuan dari pengendalian sosial adalah untuk mewujudkan keserasian dan ketentraman dalam masyarakat. Hal ini merupakan sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma - norma sosial agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

merupakan garis-garis dasar ilmu pengetahuan dan yang mendukung teori lainnya, dalam hal ini khususnya teori sibernetika. Teori sibernetika menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Masyarakat dalam keadaan bagaimanapun, mulai dari masyarakat yang sederhana sampai kepada masyarakat yang paling moderen pastilah mempunyai sistem hukum yang mengatur hubungan mereka antara satu dengan yang lain⁵⁹. Hal ini nampak pada keempat skema yang dibentuk Parson, yang merupakan sebuah kerangka untuk menganalisa tahap-tahap awal atau gerakan-gerakan permulaan yang dapat diramalkan. Semua tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dihubungkan dengan keempat persyaratan dalam teori sibernetika ini. Dunia siber adalah pola baru yang hadir memasuki ke berbagai sendi aktifitas dan bahkan kehidupan manusia, ikut bersamanya berbagai masalah baru pula, olehnya prediksi masalah yang ikut tersebut harus segera diramalkan bahwa kemana masalah itu akan melekat pada subjek dan objek.

Di dalam dunia siber melahirkan berbagai komoditi, yang dapat menghasilkan nilai-nilai kesejahteraan dalam berbagai bentuk. Karena dengan terbukanya sebuah komoditi yang besar dan baru serta butuh

Teori Sistem: Yaitu suatu kerangka yang terdiri dari beberapa elemen / sub elemen / sub sistem yang saling berinteraksi, sinergi, berpengaruh dan saling ketergantungan. Konsep sistem ini digunakan untuk menganalisis perilaku dan gejala sosial dengan berbagai sistem yang lebih luas maupun dengan sub sistem yang tercakup di dalamnya. Adanya hubungan yang saling keterkaitan dalam sistem sosial, contohnya keterkaitan antara hukum, agama, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, sosial yang tak dapat terpisahkan dan saling berinteraksi.

⁵⁹ Syamsuddin Pasamai, Penetapan Sistem Pengukuhan Penetapan Kawasan Hutan dari Aspek Hukum Penatagunaan Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan, PT.Umitohaukuwah Grafika, Makassar, 2009,. Hal.5. Dikutip dari: Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi & Sosiologi Hukum, (Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan)*, PT.Umitoha Ukuwah Grafika, Makassar, 2009. H, 159

keahlian khusus, maka prediksinya akan cenderung menghasilkan konflik yang besar pula. Kenyataannya, dunia siber saat ini membantu manusia untuk berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup merupakan suatu bentuk pola baru yang sedang digandrungi oleh masyarakat, dan itu adalah bagian dalam sistem kehidupan moderen saat ini. Masyarakat mendapatkan tingkat-tingkat kesejahteraan yang didambakannya dalam pemanfaatan dunia siber dalam kegiatan sehari-harinya, dengan efektif dan efisien merupakan alasan utama, sehingga pola baru dalam perwujudan kesejahteraan mulai diaplikasikan dalam kehidupan di hampir setiap manusia-manusia moderen. Olehnya, pendekatan skema yang dicetuskan oleh Talcott Parson inilah diaplikasikan oleh setiap individu.

"Ethical judgments are judgments by which an individual, who is facing an ethical dilemma, evaluates the ethical problems, consider alternatives and choose an alternative that best solves the problem to attain the most beneficial outcomes".⁶⁰ Tahapan masyarakat atau individu melakukan sebuah tindakan misalkan dimulai dengan hadirnya suatu situasi yang tidak nyaman dalam suatu masyarakat, yang merupakan suatu kondisi yang tidak diharapkan oleh individu-individu dalam suatu sistem kemasyarakatan, hal ini tentunya bertentangan dengan suatu keadaan yang diinginkan sebagai suatu tujuan. Situasi yang tidak sesuai dengan sistem kemasyarakatan itu sendiri akan bertindak mencoba untuk melakukan sebuah penyesuaian (*adaptation*) untuk menuju kearah suatu tujuan tertentu

⁶⁰ Fang, M.L., 2006. *Evaluating Ethical Decision Making of Individual Employees in Organization – an integration framework*. Journal of American Academy of Business, Cambridge, Hollywood, 8 (2), 105-113.

(*goal*), misalnya tujuan diadakan hukum, dalam rangka mengupayakan keseimbangan dalam masyarakat ini dapat tercapai. Dalam kaitannya, teori sistem menyatakan bahwa ada tujuan yang hendak dicapai melalui seluruh komponen subsistemnya yang diharapkan bekerja dengan baik, tentunya jika tujuan tercapai maka sama halnya mengurangi potensi kondisi yang tidak diinginkan, atau bahkan mengatasi kondisi yang tidak diharapkan atau tidak sesuai dengan sistem kemasyarakatan yang berlaku pada kondisi tersebut.

Dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan tentunya terdapat usaha yang kuat agar tujuan tersebut dapat tercapai. Terkadang dorongan yang begitu kuat untuk mencapai tujuan itulah mampu membuat individu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hal ini terlihat seperti sebuah politik yang tidak baik jika dalam mencari tujuan (*goal*) itu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sistem moral dan kaidah yang sewajarnya, jika kemudian akan menjadi hukum maka ini akan menjadi hukum yang jahat (*misdedicrecht*). Padahal dalam mewujudkan suatu tujuan (*goal*) yang baik dalam melakukan sebuah tindakan seharusnya berlandaskan dengan moral atau kaidah yang baik, misalkan dalam pembentukan suatu pola peradaban yang baik tentunya dengan menggunakan kaidah atau moral yang baik. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas dan nilai-nilai yang baik.⁶¹

⁶¹ Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, 2014, Thafa Media, Yogyakarta. Hal, 75

Untuk mendukung agar suatu tujuan tercapai maka tidak hanya penyesuaian dan dengan cara berpolitik saja, misalkan dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangannya, agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Dibutuhkan alat lain dalam upaya persiapan ke target awal yang membuat individu melakukan suatu tindakan. Yaitu dengan upaya yang merupakan alat terpenting lainnya ini terdapat dalam sub sistem sosial (*integration*), yaitu mempunyai solidaritas antar individu dalam masyarakat sehingga mampu saling mendukung ke arah tujuan yang sama. Efektifitas dari pada penyatuan harapan, menyamakan persepsi melalui interaksi sosial yang ingin dicapai oleh tiap-tiap individu dalam suatu kontrak masyarakat, akan terwujud dalam suatu keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Young berpendapat bahwa, interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa itu tak ada kehidupan sosial.⁶²

Dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, manusia cenderung untuk selalu berhubungan dengan lingkungannya. Terjadinya interaksi sosial selalu didahului oleh suatu kontrak sosial dan komunikasi.⁶³ Bagaimana mungkin suatu keseimbangan dalam masyarakat itu dapat tercapai jika tidak melakukan penyatuan cita-cita atau harapan yang dibahasakan? Tentunya masih tetap akan terjadi suatu kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan suatu sistem saat ini dan keadaan yang didambakan.

Selanjutnya terdapat alat terpenting lainnya dalam teori yang dicetuskan oleh Parson, yaitu sub sistem budaya. Apakah budaya yang

⁶² Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. ke 42, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 54.

⁶³ Astrid S Susanto, 1985, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Bandung.

merupakan suatu tujuan awal yang ingin dicapai merupakan budaya yang dapat diterima oleh masyarakat yang menginginkan tercapainya suatu target dalam sistem sosial kemasyarakatan? Tentunya hal ini menjadi faktor yang paling kaya perannya dalam teori sibernetika, sebab sistem budaya merupakan nilai yang paling hakiki dan pola normatif yang terkandung di dalam sistem budaya ini.

Masyarakat membentuk budaya sebagai lembaga dalam sistem sosial dan memasukkannya kedalam kepribadian setiap individu, dan akan menjadi prilaku dasar sesuai tujuan yang pernah tercapai dalam sebuah kesepakatan pada suatu masyarakat. Jika merujuk ke sejarah bagaimana hukum di tengah masyarakat itu lahir, dapat diambil dari buah pikiran Fredrich Carl von Savigny dengan dalil tersohornya "*das recht wird nicht gemacht, aber es ist un wird mit dem volke*" (hukum itu tidak dibuat, namun tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat)⁶⁴. Lalu kesepakatan ini akan menjadi sebuah alat untuk pengendalian sosial, karena telah sepakat untuk menjalankan hak dan kewajiban yang akan membawa ketertiban, dengan sifat memaksa kepada masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma serta kaidah-kaidah yang berlaku di tengah masyarakat atau bertindak etis.

Pencapaian tujuan melalui teori sibernetik ini dihubungkan dengan kepribadian tiap-tiap individu dalam suatu kelompok masyarakat, dorongan dasar yang membuat suatu tindakan awal haruslah mampu mewujudkan titik

⁶⁴ Sjachran Basah, 1987. *Ilmu Negara*, Cetakan III, Alumni, Bandung. hal, 6

temu dari berbagai tujuan individu, tentunya akan mengarahkan kearah suatu orientasi nilai bersama. Proses yang dilalui tiap individu, tiap kelompok atau tiap masyarakat akan mampu menghasilkan keseimbangan jika selalu melakukan pertemuan-pertemuan secara intens dan selalu membahas setiap masalah yang dihadapinya, salah satu pola seperti inilah dibutuhkan suatu pengembangan orientasi bersama terhadap satu sama lainnya.

Sesuatu yang dicita-citakan oleh masyarakat sebagai orientasinya, merupakan faktor penting dalam menjaga keutuhan dan keamanan setiap orang sebagai warga negara. Di dalam negara yang masyarakatnya bercorak *plural society*, seperti Indonesia, pengetahuan tentang interaksi sosial yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya sangatlah penting. Dengan mengetahui dan memahami perihal kondisi yang dapat menimbulkan serta mempengaruhi bentuk interaksi sosial tertentu, maka pengetahuan tersebut dapat disumbangkan bagi usaha pembinaan bangsa dan masyarakat.⁶⁵ Oleh karena itu, secara gamblang terlihat bahwa berbagi informasi antar sesama akan membawa dampak yang begitu luas, salah satunya adalah pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan penelitian ilmu hukum pada khususnya. Ilmu hukum adalah bagian dari kebutuhan seluruh manusia yang ada didunia ini dalam rangka menjaga keseimbangan dalam bermasyarakat dan menjaga peradaban manusia hingga akhir zaman.

⁶⁵ Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. ke 42, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 54

3. Pengaruh Sibernetika terhadap Kepastian Hukum

Suatu kesepakatan akan terjalin dalam masyarakat, dan akan menciptakan suatu kontrak sosial, yang mana bertujuan sebagai alat untuk menjaga hak-hak individu. Dalam kesehariannya, masyarakat membutuhkan suatu kaidah yang dapat menjaga keseimbangan dalam hidup bermasyarakat dan cara bagaimana bisa mempertahankan hidup. Tindakan yang diambil dalam menghindari ancaman-ancaman yang menakutkan manusia adalah pembentukan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan.

Berangkat dari asas, pelaku atau masyarakat akan membentuk suatu norma yang baik. Secara dinamis, norma ini terus dibahas demi menemukan bentuk terbaiknya sebagai suatu alat yang dapat menjaga tatanan hidup masyarakat. Dua unsur pembentuk hukum dalam masyarakat, yaitu: (1) Unsur kenyataan adalah adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat dan secara berulang-ulang serta berkesinambungan dan rakyat mentaati serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. (2) Unsur Psikologis adalah setelah hukum adat ini ajeg atau berulang-ulang yang dilakukan selanjutnya terdapat keyakinan pada masyarakat bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum, dan menimbulkan kewajiban hukum (*opinion juris necessitatis*).⁶⁶

Subsistem budaya memiliki fungsi untuk melengkapi unsur lain dalam suatu sistem agar dapat memperbaiki dan memelihara proses pencapaian

⁶⁶ Sri Warjiyati, 2006 *Memahami Hukum Adat*, IAIN Surabaya. hal. 22

tujuan melalui suatu tindakan. Masyarakat membutuhkan keadaan yang seimbang melalui norma-norma yang baik agar selalu ditaati. Secara berkesinambungan pada tingkat individu maupun pola-pola kultural diupayakan agar sistem berjalan, dengan memelihara suatu keadaan yang seimbang dalam masyarakat atau memperbaiki keadaan yang tidak seimbang dalam masyarakat. Tipe-tipe masyarakat⁶⁷, yang mempunyai karakter beragam dalam suatu budaya, apabila tidak dijaga agar tetap dalam keadaan seimbang, maka dapat dipastikan tidak akan memperoleh hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Oleh karenanya, mewujudkan kontrak sosial, dengan menyerahkan haknya (sebagian) kepada pihak yang membuat kontrak sosial diharapkan dapat menjamin keamanan dan saling kerja sama menggapai keadaan yang diharapkan.

Adapun aspek kepribadian masyarakat mengandung unsur psikologis dalam hal pembentukan hukum di tengah masyarakat, terwujud dalam pribadi dan tertanam dalam diri masing-masing individu. Unsur psikologis akan membentuk lembaga dalam sebuah masyarakat dan akan memasuki individu dalam bentuk norma dan nilai, yang ditanamkan oleh pelaku yang mengambil sebuah tindakan untuk menggapai sebuah tujuan yang diharapkannya. Pola pembentukan kultur baru itu disisipkan oleh pelaku kepada individu.

⁶⁷ Tipe-tipe Masyarakat: (1) Masyarakat Litigasi dan Masyarakat Anti Litigasi; (2) Masyarakat Konsensus dan Masyarakat Konflik; (3) Masyarakat Dominasi Hukum dan Masyarakat Dominasi Kultur; (4) Masyarakat Sederhana dan Masyarakat Kompleks. Dalam Syamsuddin Pasamai, 2009, *Sosiologi & Sosiologi Hukum, (Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan)*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar. h. 160-166.

Pola kultural baru tidak tumbuh bersamaan dalam sebuah kebudayaan. Akibatnya, tentu saja terdapat pada suatu masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berserakan, tidak saling berhubungan, atau walaupun berhubungan tapi tidak saling mendukung, malah justru saling melemahkan, tidak teratur bahkan tidak memberikan kepastian (*chaos*⁶⁸). Padahal harapan pelaku tindakan menginginkan agar hukum yang terdiri dari beragam bagian itu seharusnya saling berhubungan, meskipun terdapat perbedaan namun tetap saling mendukung, dengan memahami bahwa kita berada dalam wilayah yang sama.

Pola perwujudan cita-cita di dalam sebuah kultur yang dibentuk oleh aktor atau pengambil tindakan, dibangun melalui pendekatan kultural dengan proses penemuan hukum, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang sudah ada. Mewujudkan tujuan dengan pendekatan kultural, tidak hanya memasukkan ciri-ciri lokal namun juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut masyarakat internasional.

Tujuan (*goal Attainment*) merupakan salah satu unsur dalam teori sibernetika, bermula dari tindakan manusia diarahkan pada satu tujuan. Melalui skema AGIL dalam teori sibernetika, hukum yang dicita-citakan

⁶⁸ Teori *Chaos* dicetuskan oleh Charles Samford, menganggap bahwa ketidakteraturan membawa hukum itu dinamis. Menurutnya, hukum dilihat secara legalistik positivistik malah tidak memperlihatkan keteraturannya, sebab tidak mampu menggali dan menemukan rasa keadilan secara utuh di dalam masyarakat, bisa jadi anggapan teratur para kalangan legal positivisme malah penuh dengan ketidakteraturan dan kekacauan. Berangkat dari ketidakteraturan tersebut membawa kestabilan dalam menyikapi setiap persoalan yang muncul dikarenakan keinginan yang besar manusia dalam mencari wujud hukum yang ideal bagi manusia. Tambahnya, jika ingin melihat suatu keteraturan maka diperlukan upaya yang keras dalam mendiagnosa ketidakteraturan. Sungguh ironi ketika hanya undang-undang saja yang akan ditegakkan, tapi tidak menegakkan tatanan sosial.

(*ius constetudum*) tentunya diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, agar alasan-alasan dalam mewujudkan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dapat hadir dan dirasakan oleh setiap individu. Meski terkadang kepastian hukum itu tekesan dipaksakan, untuk mendistribusikan kekuasaan secara maksimal, melalui pola monopoli unsur paksa yang sah (negara). Namun pola tersebut tidak akan bertahan lama jika dipaksakan, kaidah yang hidup selalu hadir membawa nilai-nilai kebaikan, meski sifatnya abstrak namun punya kekuatan. Dapat diamati dalam realitasnya, bila dorongan yang diberikan masyarakat dalam rangka mengontrol pemerintah atau negara tidak mendapat respon yang baik, maka semangat yang ada dalam diri masyarakat (energi) dapat berubah atau menjelma menjadi kekuatan (*power*) yang dahsyat untuk memaksa pemerintah atau negara tunduk pada hukum.⁶⁹

Perwujudan kepastian hukum oleh pemerintah terlihat dari penggunaan kekuasaannya sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah membentuk regulasi agar dapat mengontrol masyarakatnya untuk mencapai tujuan bersama dalam menggapai tujuan negara. Kerjasama yang baik diperlihatkan dalam setiap unsur negara sebagai sebuah sistem, tidak akan tercapai jika aturan main atau tata cara dalam bernegara tidak diadakan dalam bentuk suatu kepastian hukum, dalam hal ini tentunya berlaku teori kontrak sosial, antara pemerintah dan rakyatnya.

⁶⁹ Jogi Nainggolan, 2015. *Energi Hukum*, Refika Aditama, Bandung. hal, 23

Jika mengamati penataan potensi-potensi daerah oleh pemerintah daerah yang diberikan hak untuk membentuk produk peraturan daerah. Pembentukan peraturan bertujuan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan daerah, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan ciri khusus yang dimiliki daerah atau kearifan lokal, yang tidak berjalan dengan baik. Kepentingan masyarakat secara umum harus dapat ditata oleh pemerintah daerah melalui peraturan yang dibentuknya sehingga masyarakat dapat hidup dengan tertib dan damai. Pembentukan Peraturan Daerah mestinya juga memperhatikan dan mengacu pada peraturan-peraturan lain yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk tidak memberikan dampak pada pembatalan terhadap Peraturan Daerah yang bentuk, karena bertentangan daengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷⁰

Perwujudan kepastian hukum dalam sebuah kelompok masyarakat terlihat dari internalisasi nilai-nilai yang telah disepakati kedalam diri pribadi individu suatu masyarakat tertentu. Masyarakat meyakini adanya sesuatu yang harus ditanamkan bersama kedalam diri masing-masing individu anggota masyarakat sebagai pedoman untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat sebagai tujuan yang selalu menjadi sebuah cita-cita seluruh masyarakat.

⁷⁰ Victor Juzuf Sedubun, *Kajian Filsafat Hukum Tentang Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Sasi Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010, h.16

Tujuan yang diharapkan dari pengaplikasian teori sibernetika ini merupakan suatu penyajian gambaran sebanyak mungkin mengenai situasi yang dibutuhkan agar hukum dapat berlaku di tengah masyarakat. Upaya agar dapat menerapkan keberlakuan hukum secara maksimal di dalam masyarakat dengan memprediksi beberapa masalah hukum dalam masyarakat yang kemungkinan akan timbul dikemudian hari.

Teknologi siber merupakan suatu kebudayaan baru yang telah memasuki ke segala penjuru budaya dan masyarakat yang ada dimuka bumi ini. Namun dibutuhkan pola yang cermat menyikapi dampak daripada hadirnya budaya ini, sebab teknologi siber tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kehidupan saat ini, namun juga ada dampak negatif yang dapat timbul akibat dari tindakan aktor/pelaku dalam pencapaian kepentingan tertentu sebagai tujuannya.

Het recht hink achter de feiten aan,⁷¹ tidak pernah diharapkan menjadi sebuah adagium secara berkesinambungan keberlakuannya. Sebab, terbentuknya pola kebiasaan baru di era moderen ini dalam hal dunia siber, tentunya membawa dampak permasalahan hukum yang baru dalam kehidupan ini, olehnya kebutuhan hukum haruslah mampu segera memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Perkembangan, pembaharuan dan pengembangan teknologi pada umumnya adalah karya masyarakat. Karya tersebut merupakan komoditi yang tinggi nilai ekonominya. Sesuatu yang nilai kemanfaatannya cukup tinggi, maka secara otomatis

⁷¹ *Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*, pengertian secara istilah motto hukum Belanda ini yaitu hukum / undang-undang berjalan dibelakang kejadian/peristiwa yang muncul di masyarakat. Undang-undang senantiasa terseok-seok / tertatih-tatih berupaya mengejar peristiwa / fakta yang seyogianya diaturnya.

menyebabkan nilai ekonominya juga menjadi lebih tinggi. Suatu benda atau kebendaan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, mengandung dan mengundang potensi pertikaian yang tinggi pula. Oleh karena itu, hukum perlu dan harus mengatur semua kemungkinan yang dapat terjadi.⁷² Agar kepastian hukum menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi dunia siber, sehingga harapan masyarakat dalam konsisten terhadap tujuan awal adalah sebuah keseimbangan dalam kehidupan, melalui hukum harus muncul sebagai kekuatan yang memberikan solusi.⁷³

Memahami kenyataan hukum yang kompleks, tentu pandangan awal kita mesti menuju pada ranah sosial masyarakat. Walaupun hukum dan masyarakat adalah situasi yang saling berpengaruh, akan tetapi hukum selalu tertatih-tatih mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakatnya. Apabila situasi masyarakat sosial berada pada situasi yang kompleks, maka hukum yang tercipta pun akan kompleks pula, bahkan menanggulangi masyarakat yang serba kompleks itu tidak dapat melulu menggunakan cara-cara masinal/ datar-datar saja.⁷⁴ Tentunya ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Adil pada hakikatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.⁷⁵ Jika dengan cara-cara yang biasa-biasa saja untuk menyelesaikan perkara yang begitu kompleks, tentunya sulit mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

⁷² Suteki, 2013. *Hukum dan Alih Teknolog, Sebuah Pergulatan Sosiologi*, Thafa Media, Bantul, Yogyakarta. hal, 23.

⁷³ *ibid*

⁷⁴ Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, 2014, Thafa Media, Yogyakarta. Hal, 120

⁷⁵ Sufirman Rahman & Nurul Qamar, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Refleksi, Makassar.

Oleh karenanya, demi keadilan sebagai tujuan akhir bagi pelaku tindakan, tatkala kemanfaatan dan kepastian hukum menjadi alasan untuk menegakkan hukum, maka esensinya harus bermuara kepada perwujudan suatu keadilan, yang mana keadilan itu harus disegerakan, jika itu tidak disegerakan, maka yang berhak atas keadilan itu tidak mendapatkan lagi esensi dari keadilan itu sendiri.⁷⁶ Agar keadilan dapat disegerakan maka diperlukan penanganan permasalahan yang timbul dengan cara yang kritis dan kreatif.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Era pemanfaatan dunia siber memberikan potensi akan timbulnya berbagai konflik dikemudian hari, hal ini disadari namun tidak bisa pula dihindari, sebab dunia siber telah merambah masuk kedalam sistem kehidupan sehingga menjadi sebuah subsistem baru. Ketika masyarakat tidak memanfaatkannya maka konsekuensinya masyarakat akan kehilangan kesempatan untuk mempunyai daya saing dalam kehidupan moderen ini. Namun disisi lain, jika pemanfaatan dunia siber disalahgunakan maka akan membawa dampak yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Pendekatan dengan menggunakan skema AGIL menjadi salah satu faktor penentu untuk dijadikan sebagai pola dalam upaya memastikan tujuan akhir sebagai bentuk sebuah keberhasilan. Keberhasilan yang ingin dicapai tentunya adalah bagaimana mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat

⁷⁶ Nurul Qamar, dalam Perkuliahan MKPD, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia. 2015.

yang memanfaatkan dunia siber ini dapat terus terjaga, agar hukum tidak hanya sebagai kepastian hukum hari ini, namun juga dapat menjadi kepastian hukum dimasa akan datang, olehnya harus tetap dijaga, agar eksistensinya sebagai pedoman bermasyarakat dapat seutuhnya terwujud, dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Saran

Menghadapi era pemanfaatan dunia siber yang sudah tidak dapat dibendung lagi kehadirannya dan sudah merasuki setiap sendi-sendi kehidupan, maka diharapkan agar segera dapat memberikan masukan-masukan penting agar dunia siber ini bukan sesuatu hal yang harus dihindari, namun menjadi sebuah media pengantar membawa manusia menjadi lebih maju dari sebelumnya. Dunia siber merupakan sebuah lompatan besar dalam perkembangan kehidupan manusia, maka upaya-upaya tidak peduli atau tidak ikut terhadap dunia siber ini akan membawa manusia-manusia yang tidak mampu dan menerima dalam menyikapi perubahan zaman.

Pemanfaatan era teknologi dunia siber yang mulai merambah kesetiap kegiatan manusia harus segera diatur melalui pendekatan skema AGIL ini, sebab masyarakat yang majemuk mendukung dalam pengambilan sampel dalam penelitian, dalam usahanya menjaga keseimbangan kehidupan manusia, dengan adanya kepastian hukum yang hadir dan mampu mengakomodir setiap permasalahan yang hadir akibat lahirnya pola dan pemanfaatan dunia siber ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Astrid S. Susanto. 1985. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bina Cipta : Bandung.
- Faisal. 2014. *Memahami Hukum Progresif*. Thafa Media : Yogyakarta.
- Jogi Nainggolan, 2015. *Energi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Sjachran Basah. 1987. *Ilmu Negara*. Cetakan III. Alumni : Bandung.
- Sri Warjiyati, 2006. *Memahami Hukum Adat*, IAIN Surabaya.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. ke 42. CV. Rajawali : Jakarta.
- Sufirman Rahman & Nurul Qamar. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Pustaka Refleksi : Makassar.
- Suteki. 2013. *Hukum dan Alih Teknolog, Sebuah Pergulatan Sosiologi*. Thafa Media : Bantul, Yogyakarta.
- Syamsuddin Pasamai. 2009. *Sosiologi & Sosiologi Hukum, (Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan)*. PT.Umitoha Ukhuwah Grafika : Makassar.

Jurnal

- Victor Juzuf Sedubun, 2010. *Kajian Filsafat Hukum Tentang Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Sasi Vol.16. No.3 Bulan Juli – September.
- Fang, M.L., 2006. *Evaluating Ethical Decision Making of Individual Employees in Organization – an integration framework*. Journal of American Academy of Business, Cambridge, Hollywood.

Internet

- [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Sibernetika](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Sibernetika), diakses tanggal 21 Maret 2015
- [Http://Hermannippi.Blogspot.Com/2014/08/Talcott-Parsons-Dengan-Teori-Sibernetik.Html](http://Hermannippi.Blogspot.Com/2014/08/Talcott-Parsons-Dengan-Teori-Sibernetik.Html), diakses 21 Maret 2015
- Ludwig Bartalanffy, <http://bk-smansapurwodadi.blogspot.com/2013/02/teori-belajar-sibenertik.html>, diakses 23 Maret 2015

JURNAL HUKUM LENTORA JUSTICE

Terbit 2 kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang ilmu hukum. ISSN 2356-010X.

Ketua Penyunting

Muliadi, S.H., M.H.

Penyunting Ahli

Dr. Heru Wardoyo, S.H., M.H.

Dr. Syamsul Haling, S.H., M.H.

Dr. Muh. Akbar, S.H., M.Hum.

Dr. Oskar S Matompo, S.H., M.H.

Dr. Malik Bram, S.H., M.H.

Penyunting Pelaksana

Andi Nurul Is. Achmad, SH. MH

Moh. Rizki Syafaat, SH.MH

Moh. Nafri, SH. MH

Pelaksana Tata Usaha

Andi Famrizal, S.Sos., M.Si.

Muhammad Annas Ma'ruf, S.M.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palu Gedung Fakultas Hukum Jl. Hang Tuah
No. 29 Palu 94117. Telp. (0451) 456505.

JURNAL HUKUM LENTORA JUSTICE terbit mulai Juni 2014 oleh
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu.

ISSN 2356-010X

JURNAL LENTORA JUSTICE

ISSN 2356-010X

VOLUME 3 NOMOR 2 DESEMBER 2016

Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, S.H., M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu)

Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Geng Motor di Kota Palu

Achmad Allang, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako)

Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Aan Aswari, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia)

Sibernetika, Teknologi Siber dan Kebutuhan Hukum.

Drs. H. Arsyad Said, S.H., M.H.. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako)

Islam Mengajarkan Pernikahan untuk Menghindari Terjadinya Perzinahan dan Kehamilan di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam.

Kaharuddin Syah, S.H., M.H.. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu)

Aspek Hukum Tindak Pidana Perjudian Online.

Hj. Haerani Husainy, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Palu)

Konsep Ganti Rugi terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Reklamasi Pantai.

Gedung Kantor Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Jl. Hang Tuah No. 29 Palu. Telp. (0451) 456505